

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pasca Reformasi, PT Bhuana Ilmu Populer.

_____, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press.

_____, *Pengadilan Khusus*, dalam Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, 2013.

_____, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

_____, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Manan, Bagir, 2002, *Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Tim LeIP.

Bisaryadi dkk, *Komparasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, 2011, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Pusat Penelitian Dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi.

Electoral Justice, 2010, An Overview of the International IDEA Handbook, International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Ferejohn, et. al, 2001 *Constitutional Culture and Democratic Rule*, Cambridge University Rule Press, First Published.

Frans Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta, Gramedia.

Hamdan Zoelva, 2013, *Aspek Konstitusionalitas Pengadilan Khusus di Indonesia*, dalam Putih Hitam pengadilan Khusus, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Haryanto, 1984, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: Liberty.

Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Kedepan*, Jakarta, Rajawali Press

Huda, Uu Nurul, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung, Fokusmedia.

Huda, Ni'matul, Pembaruan Hukum Nasional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta 2019.

Jurdi, Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana.

Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2014, 2015, *Menegakan Konstitusionalisme Dalam Dinamika Politik*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, *Dinamika Pembangunan Budaya Hukum dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2016, *Harmoni Sosial Dan Budaya Demokrasi Yang Berkeadilan*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017, *Konsistensi Pada Konstitusiusi dan Ideologi Negara*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018, *mengawal daulat Rakyat*, Jakarta, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, *Mengawal Demokrasi Konstitusional Pemilu Serentak 2019*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Laporan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020, *Menegushkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm.5

Laporan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR masa sidang IV Tahun 2008-2009 Ke Brasil Tanggal 21-27 Juni 2009.

LeIP, MTI, PHSK dan TGPTKP, Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, 2002, Touchprint.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Cet. IX, Prenadamedia Group, Jakarta,

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Nasrullah dan Tanto Lailam, 2019, *Politik Hukum & Desain Badan Peradilan Khusus Pilkada*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Ridwan HR. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press,

Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana.

Rudy dan Charlyna S. Purba, 2014, *Dinamika Sengketa Pemilukada, Evolusi Sengketa Pemilukada Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, PT. Nagakusuma Media Kreatif.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Soekanto, Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press,

_____, dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,

Tutik, Titik Triwilan, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.

Vickery, Chad, *Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections*, 2011, Washington, D.C, IFES

Wiredarme, 2019, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Bangsa.

Widodo, Heru, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Adonara, Firman Floranta, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

Adhani, Hani, 20019, *Sengketa Pilkada Penyelesaian dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

- Assegaf, Rifqi Sjarief Hanya Hakim Yang Bersih Dan Kompeten Yang Layak Adili Koruptor, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2 No. 1 Januari 2002.
- Ayuni, Qurrata, Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Fakultas Hukum Univristas Indonesia, Volume 48, Nomor 1, Maret 2018.
- Ambarini, Irma D, Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum: Perbandingan Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia dan Brazil, *Padjadjaran Law Review*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017.
- Bisariyadi dkk, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3, September 2012.
- Burazin, Luka, *The Concept of Law and Efficacy*, Faculty of Law Zagreb, Croatia 27 June 2017.
- Cahyaningsih, Diana Tantri, Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot, *Jurnal Rechtsvinding*.
- Fajarwati, Meirina, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional, *Jurnal Kajian* Vol. 22 No. 3 September 2017.
- Huda, Ni'matul, Telaah Kasus Sengketa Hasil Pilkada Depok, Dalam Perspektif Yuridis, *Jurnal Hukum*. Nomor 30, Volume 12, September 2005.
- Lailam, Tanto & Putri Anggia, Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 17 Nomor 2 Juni 2020.
- Marchetti, Vitor, Electoral Governance in Brazil, *Brazilian Political Science Review*, Volume 6, Nomor. 1, 2012.
- Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, *Jurnal Hukum*, Nomor 3, Volume 16, tahun 2009.
- Nugrah, Al Fajar, Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV, Nomor 2, Desember 2016.
- Pratikno, Calon Independen, Kualitas Pilkada, dan Pelembagaan Parpon, *Jurnal JSP*, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007.
- Prasetyo, Tony, Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 13, Nomor 2 Oktober 2016.

- Rishan, Idul, Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2021.
- Risnain, Muh., Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014.
- _____, Konsep Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan Dalam Membangun Perekonomian Nasional Yang Sehat Dan Adil, *Jurnal Ius*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2018.
- Seba, Magdalena Laurenzia, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 5, Nomor 9, Nov 2017.
- Setiyawan, Dimas Bima, Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Sourdin, Tania and Naomi Burstyn, Justice Delayed Is Justice Denied, *Victoria University Law and Justice Journal*, 2014.
- Suparto, Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2016.
- Suhartono, Slamet, Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, September 2015,
- Sukma, John Gardha Galang Mantara, Open Legal Policy Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017, *Jurnal Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 5, Januari 202.
- Wawan Dkk, Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volume 17, Nomor 2, Desember 2015.
- Wicaksono, Dian Agung dan Ola Anisa Ayutama, Inisiasi Pengadilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menghadapi Kesenjangan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 4, Nomor 1, April 2015.
- Yudho, Winarno, Heri Tjandrasari, Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Februari 1987.
- Yusrizal Dj, Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945), *Jurnal Menara Ilmu*, Volume 12, Jilid I No.79 Januari 2018

Skripsi/Tesis/Disertasi

Muhammad Irsyad Faqih Adnan, Gagasan Pembentukan Badan Pengadilan Khusus Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Rahmatullah Indrasari, Analisis Kritis Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019.

Internet

<https://www.suara.com/news/2015/07/27/104027/ini-daftar-269-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2015> diunduh tanggal 2 Januari 2022

<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batas-sengketa-pilkada.html> diunduh tanggal 3 Januari 2022 pukul 14:30 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/22003901/tenggat-waktu-45-hari-ajukan-uji-formil-uu-di-mk-dinilai-cukup?page=all> diunduh tanggal 5 Januari 2022

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia> diunduh tanggal 1 Januari 2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia> diunduh tanggal 1 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

<https://fokus.tempo.co/read/1553559/akhir-polemik-jadwal-pemungutan-suara-pemilu-2024/full&view=ok> diunduh tanggal 25 Januari 2022 pukul 15.10 WIB.

<https://panmohamadfaiz.com/2018/09/21/efektivitas-ambang-batas-sengketa-hasil-pilkada/> diunduh tanggal 12 Januari 2022 pukul 14.00 WIB.

<http://perludem.org/wp-content/uploads/2017/04/SISTEM-PEMILU-DI-MEKSIKO.pdf> diunduh tanggal 10 Januari 2022

<http://perludem.org/wp-content/uploads/2017/04/ELECTORAL-TRIBUNAL-DI-MEKSIKO.pdf> diunduh tanggal 24 Desember 2021 pukul 13.00 Wib.

<https://pshk.uui.ac.id/2017/07/pengadilan-khusus-pemilu-urgen-dibentuk/> diunduh tanggal 13 Desember 2021 pukul 14.00 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/25/09404441/jalan-panjang-evi-novida-hingga-kembali-jadi-komisioner-kpu-setelah-dipecat?page=all> diunduh tanggal 15 Januari 2022, pukul 14.14 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150213083549-32-31827/ma-dan-mk-ogah-tangani-sengketa-pilkada> diunduh tanggal 13 Januari 2022 pukul 13.25 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4> diunduh tanggal 17 Januari 2022

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150120_perppu_pilkada_sah diunduh tanggal 13 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/161/PENGADILAN_KHUSUS_02.pdf di unduh tanggal 1 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 4 Tahun 1999 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang 5 tahun 1999 tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha

UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pertaturan MA Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota

Peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati, Dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan
Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati,
Dan Walikota

Putusan

Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013

Putusan MK No.14/PUU-XI/2013

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019